

**THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, EXEMPTION OF TRANSFER FEES,  
TAXPAYER AWARENESS, AND TAXATION SOCIALIZATION ON  
MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE  
(A STUDY ON ONLINE OJEK DRIVERS IN JAMBI CITY)**

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PADA DRIVER OJEK ONLINE DI KOTA JAMBI)**

**Alfanny Sutika Yuda<sup>1)\*</sup>**

**Wiralestari<sup>2)</sup>**

**Riski Hernando<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

<sup>2)&3)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

<sup>\*)</sup> Korespondensi

E-mail: [alfannyyuda@gmail.com](mailto:alfannyyuda@gmail.com)<sup>1)</sup>, [wiralestari11@unja.ac.id](mailto:wiralestari11@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [riskihernando@unja.ac.id](mailto:riskihernando@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of tax sanctions, vehicle ownership transfer fee waivers, taxpayer awareness, and tax socialization on motor vehicle tax compliance among online motorcycle taxi drivers in Jambi City. A quantitative approach employing multiple linear regression was utilized to analyze primary data collected through questionnaires from 100 respondents, selected via Stratified Random Sampling from a population of 4930 online motorcycle taxi drivers in Jambi City. The results indicate that tax sanctions and tax socialization significantly affect tax compliance, while vehicle ownership transfer fee waivers and taxpayer awareness do not. The implications underscore the need for effective tax sanction policies and enhanced tax socialization activities to bolster tax compliance in Jambi City.*

**Keywords:** *tax compliance, online motorcycle taxi drivers, tax sanctions, vehicle ownership transfer fee waivers, taxpayer awareness, tax socialization*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden, dipilih dengan teknik Stratified Random Sampling dari populasi 4930 driver ojek online di Kota Jambi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pembebasan bea balik nama dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya implementasi kebijakan sanksi pajak yang efektif dan peningkatan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, driver ojek online, sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan

## 1. PENDAHULUAN

Pajak daerah serta retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 menyatakan jika pajak daerah terutama pajak provinsi terbagi atas lima pajak termasuk pula di dalamnya pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB ialah pajak yang pemungutannya diselenggarakan pemerintah daerah sebab tiap-tiap kabupaten berhak memungut pajak kendaraannya sendiri guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tiap-tiap kabupaten tersebut (Rosida & Ernandi, 2022).

Menurut Ammy (2022), Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih rendah. Menurut data Jasa Raharja, pada tahun 2022, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya mencapai 56,7%. Hal ini mengindikasikan jika masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut menurut data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan PKB tahun 2022 mencapai Rp 32,6 triliun, atau sekitar 3,8% dari total penerimaan pajak.

Salah satu kelompok wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi fokus penelitian ini adalah driver ojek online di Kota Jambi. Driver ojek online merupakan pengguna kendaraan bermotor yang intensitas penggunaannya tinggi dan berdampak langsung pada perekonomian daerah. Saat ini di Kota Jambi sendiri terdapat jasa ojek online yang cukup berkembang pesat. Peminat cukup mengorder ojek melalui aplikasi *smartphone* dan ojek akan menjemputnya. Dari data yang di peroleh dari wawancara salah perusahaan ojek online (GOJEK), jumlah driver yang ada di kota jambi yaitu diantaranya ialah :

**Tabel 1. Jumlah data pengemudi**

MITRA	DATA PROVINSI JAMBI	TAHUN
GO-JEK ONLINE (Go Ride)	1500 DRIVER	2019
	1630 DRIVER	2020
	1800 DRIVER	2021
Total Gojek Cabang Jambi	4930 DRIVER	

Sumber. Customer Service.Gojek Cabang Jambi, 2024

Data tersebut menggambarkan perkembangan jumlah driver Go-Jek Online (Go Ride) di Kota Jambi selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Pada tahun 2019, terdapat 1,500 driver Go-Jek Online yang melayani wilayah tersebut. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah driver meningkat menjadi 1,630, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam satu tahun. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun 2021, dengan jumlah driver mencapai 1,800. Dari data ini, terlihat bahwa layanan ojek daring Go-Jek semakin populer dan berkembang pesat di Kota Jambi. Pertumbuhan jumlah driver yang konsisten dalam tiga tahun ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat akan layanan transportasi berbasis aplikasi di wilayah tersebut.

Namun, peningkatan jumlah driver ojek online juga membuka tantangan baru terkait kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, peran SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) sebagai instansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting. SAMSAT perlu memastikan bahwa para driver ojek online, yang merupakan bagian integral dari aktivitas transportasi kota, memahami dan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar PKB sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2021, terdapat 72.500 kendaraan yang melakukan pemutihan pajak dengan pendapatan daerah sebesar Rp 82.072.756.800. Pada awal tahun 2022, sudah mencapai 3.754 kendaraan yang melakukan pemutihan dengan pendapatan daerah sebesar Rp 4.549.016.100. Lebih lanjut kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi, seperti yang ditemukan dalam wawancara peneliti di kantor SAMSAT Jambi masih rendah. Indikasinya dapat dilihat dari data yang dicatat oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi, yang mencatat bahwa terdapat sebanyak 1.100 kendaraan di Kota Jambi yang telah mati pajak selama lebih dari 2 tahun.

Adapun jumlah gojek yang tidak patuh dalam membayar pajak adalah sebanyak 54%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan serius. Ketidapatuhan pajak seperti ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian dan penerimaan pajak negara. Dampaknya tidak hanya terasa dalam penurunan pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, tetapi juga dalam merusak keadilan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam membayar pajak dapat memperbesar kesenjangan antara mereka yang mematuhi kewajiban pajak dengan yang tidak, menciptakan ketidakadilan yang berpotensi mengancam stabilitas sosial.

Alasan di balik ketidakpatuhan ini bervariasi. Pertama, banyak wajib pajak kurang memahami dan menyadari pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran pajak. Kedua, beberapa dari mereka menghadapi kendala finansial, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Ketiga, informasi yang diberikan oleh pihak SAMSAT atau pemerintah setempat mungkin kurang memadai, menyebabkan ketidakjelasan mengenai cara dan manfaat pembayaran pajak. Selain itu, ketidakpuasan terhadap layanan SAMSAT juga dapat menjadi faktor, mengakibatkan keengganan wajib pajak untuk berurusan dengan instansi tersebut. Kurangnya hukuman atau sanksi yang efektif, ketidaktahuan tanggal jatuh tempo, kemungkinan pemalsuan atau penyelewengan data, serta ketiadaan insentif atau diskon juga ikut berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa ditingkatkan dengan melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya menginformasikan serta mengelola keuangan dengan tujuan memberikan informasi serta arahan kepada individu. Pada hal ini, wajib pajak hanya tertarik pada penggunaan perpajakan (Haninun & Lourent, 2021). Harapannya bisa membantu menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah bisa memaksimalkan penerimaannya sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi persoalan ekonomi yang ada. Khususnya di Indonesia, dengan cara menyadarkan Wajib Pajak akan tanggung jawab perpajakannya (Saputra et al., 2022). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilaksanakan melalui sosialisasi perpajakan pada sejumlah cara maupun bentuk sosialisasi. Akan tetapi, aktivitas sosial wajib dilakukan dengan efektif serta dengan media lain yang lebih dikenal di ruang public (Pratama, 2021). Jika Sosialisasi pajak kendaraan bermotor berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan program yang seharusnya efisien bisa mendorong masyarakat agar melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak meningkat (Kusasih & Kustiningsih, 2023). Sementara Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut (Amri & Syahfitri, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Sanksi Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Driver Ojek Online Di Kota Jambi)”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertumpu pada analisis regresi linear berganda untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jambi. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi driver ojek online di Kota Jambi. Populasi terdiri dari seluruh driver ojek online yang terdaftar di Kota Jambi, dengan total populasi sebesar 4930 orang. Sampel dipilih menggunakan teknik Stratified Random Sampling dengan mempertimbangkan margin of error sebesar 10%, menghasilkan jumlah sampel sekitar 100 responden.

Data dikumpulkan menggunakan metode angket, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dari responden. Skala Likert 5 tingkat digunakan untuk mengevaluasi sikap dan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS v.25. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sementara uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Karakteristik Responden

#### 3.1.1. Jenis Kelamin

Adapun responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	86	86%
Perempuan	14	14%
Total	100	100%

Sumber : Data Olahan, 2024

Pada tabel 2 di atas, data menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, mencapai 86% dari total 100 responden, sedangkan perempuan menyumbang 14%. Dominasi laki-laki dalam populasi responden ini mengindikasikan pola yang konsisten dengan demografi umum driver ojek online di banyak kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki di kalangan responden driver Gojek di Kota Jambi mempengaruhi komposisi demografis dalam penelitian ini.

### 3.1.2. Masa Kerja

Adapun responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja**

Masa Kerja	Frekuensi	Persen
< 6 bulan	25	25%
6 bulan – 1 tahun	24	24%
>1 tahun	51	51%
Total	100	100%

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 3 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan masa kerja mereka sebagai driver Gojek di Kota Jambi. Dari total 100 responden, sebagian besar (51%) telah bekerja sebagai driver Gojek selama lebih dari 1 tahun. Sebanyak 24% responden memiliki masa kerja antara 6 bulan hingga 1 tahun, sementara 25% sisanya memiliki masa kerja kurang dari 6 bulan. Distribusi ini menggambarkan tingkat pengalaman yang bervariasi di antara responden, yang dapat mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan keterlibatan mereka terhadap masalah perpajakan.

### 3.1.3. Pendidikan

Adapun responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
SMP	40	40%
SMA	21	21%
Diploma	15	15%
Sarjana	22	22%
Magister	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 4 menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMP (40%) dan SMA (21%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi Gojek di Kota Jambi memiliki pendidikan menengah sebagai latar belakang pendidikan mereka. Selain itu, terdapat responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, seperti Diploma (15%), Sarjana (22%), dan bahkan Magister (2%), menunjukkan keragaman dalam tingkat pendidikan di antara responden.

## 3.2. Pengujian Instrumen Penelitian

### 3.2.1. Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas untuk indikator pertanyaannya:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Indikator Variabel**

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Sanksi Pajak (X1)</b>			
X1.1	0.857	0.196	Valid
X1.2	0.529	0.196	Valid
X1.3	0.798	0.196	Valid

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.4	0.653	0.196	Valid
X1.5	0.627	0.196	Valid
<b>Pembebasan Bea Balik Nama (X2)</b>			
X2.1	0.891	0.196	Valid
X2.2	0.916	0.196	Valid
X2.3	0.604	0.196	Valid
X2.4	0.743	0.196	Valid
X2.5	0.911	0.196	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X3)</b>			
X3.1	0.880	0.196	Valid
X3.2	0.776	0.196	Valid
X3.3	0.822	0.196	Valid
X3.4	0.813	0.196	Valid
X3.5	0.826	0.196	Valid
<b>Sosialisasi Perpajakan (X4)</b>			
X4.1	0.863	0.196	Valid
X4.2	0.862	0.196	Valid
X4.3	0.683	0.196	Valid
X4.4	0.902	0.196	Valid
X4.5	0.895	0.196	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</b>			
Y.1	0.833	0.196	Valid
Y.2	0.723	0.196	Valid
Y.3	0.780	0.196	Valid
Y.4	0.846	0.196	Valid
Y.5	0.730	0.196	Valid

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat ditunjukkan bahwa setiap indikator pertanyaan terkait dengan variabel Sanksi Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah terbukti valid. Analisis menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap indikator secara konsisten melebihi nilai kritis r tabel yang ditetapkan (0.196), mengindikasikan keakuratan dan ketepatan kuisioner dalam mengukur variabel-variabel tersebut.

### 3.2.2. Uji Reabilitas

Peneliti menggunakan uji reabilitas dengan bantuan software SPSS versi 25 guna mengetahui sejauh mana kuisioner dianggap reliabel. Jika nilai yang dihasilkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6 maka kuisioner tersebut reliabel. Berikut adalah hasil uji reabilitas pada indikator variabel.

**Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas Indikator Variabel**

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Sanksi Pajak (X <sub>1</sub> )	0.870	> 0.6	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama (X <sub>2</sub> )	0.868	> 0.6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	0.868	> 0.6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	0.867	> 0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.880	> 0.6	Reliabel

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik atau reliabel. Nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel berkisar antara 0.867 hingga 0.880, melebihi nilai ambang batas minimal 0.6 yang diharapkan untuk dianggap reliabel.

### 3.3. Uji Asumsi Klasik

#### 3.3.1. Uji Normalitas

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov:

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32456608
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.081
	Positive	.042
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.106 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil uji normalitas pada tabel 7 menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai statistik uji adalah 0.081 dengan nilai signifikansi asimtotik (2-tailed) sebesar 0.106. Karena nilai signifikansi lebih besar dari alpha yang umumnya digunakan (0.05), dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Hal ini berarti asumsi normalitas untuk model yang diestimasi dapat dianggap terpenuhi.

### 3.3.2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.519	1.062		1.430	.156		
	Sanksi Pajak (X <sub>1</sub> )	.485	.095	.449	5.111	.000	.294	3.401
	Pembebasan Bea Balik Nama (X <sub>2</sub> )	.035	.093	.038	.374	.710	.220	4.548
	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	.059	.085	.065	.698	.487	.260	3.840
	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	.340	.075	.414	4.557	.000	.276	3.624

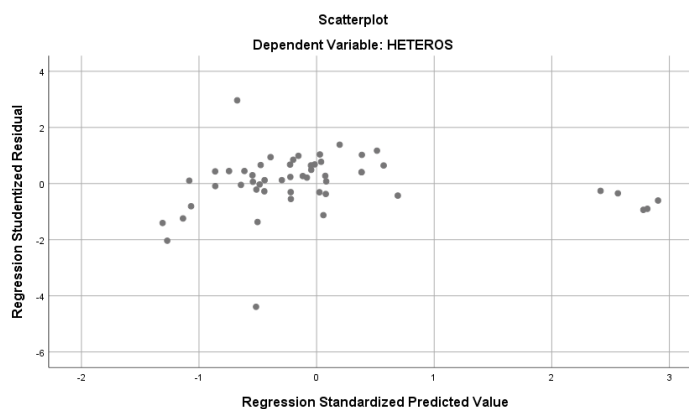
a. Dependent Variable: Y Rata-rata

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Hasil uji multikolinearitas dari tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang signifikan.

### 3.3.3. Uji Heteroskedestisitas

Persamaan regresi yang dianggap baik adalah yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Berdasarkan Scatter Plot yang digunakan untuk analisis, ditemukan hasil sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan, 2024

**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 1, pola yang teramati menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, tanpa adanya pola yang jelas seperti penyebaran titik yang melebar ke atas atau ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang diuji tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya menggunakan uji Glejser dilakukan untuk memeriksa apakah varians residual bervariasi antar pengamatan dalam model regresi. Hasil dari uji Glejser digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.121	.607		-1.848	.071
	Sanksi Pajak (X <sub>1</sub> )	-.069	.049	-.324	-1.403	<b>.167</b>
	Pembebasan Bea Balik Nama (X <sub>2</sub> )	.025	.055	.145	.463	<b>.646</b>
	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	.002	.051	.013	.045	<b>.964</b>
	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	-.034	.042	-.207	-.799	<b>.428</b>

a. Dependent Variable: HETEROS

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig.) untuk keempat variabel tersebut adalah 0.167, 0.646, 0.964, dan 0.428, yang semuanya lebih besar dari nilai alpha yang umumnya dipilih (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi yang digunakan, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

### 3.3.4. Analisis Linier Berganda

Hasil uji regresi linier sederhana merujuk ke output atau informasi yang dihasilkan setelah menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen dalam sebuah regresi linier sederhana. Regresi ini dipakai saat variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen.

**Tabel 8. Hasil Analisis Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.519	1.062		1.430	.156
	Sanksi Pajak (X <sub>1</sub> )	.485	.095	.449	5.111	.000
	Pembebasan Bea Balik Nama (X <sub>2</sub> )	.035	.093	.038	.374	.710
	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	.059	.085	.065	.698	.487
	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	.340	.075	.414	4.557	.000

a. Dependent Variable: Y\_Rata-rata

Sumber : Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Dari gambaran tersebut memperlihatkan nilai konstanta (a) adalah 1,519, serta nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen yaitu:

- Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>): 0,485
- Pembebasan Bea Balik Nama (X<sub>2</sub>): 0,035
- Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>): 0,059
- Sosialisasi Perpajakan (X<sub>4</sub>): 0,340

Adapun persamaan regresinya ialah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

$$Y = 1,519 + 0,485X_1 + 0,035X_2 + 0,059X_3 + 0,340X_4$$

Persamaan tersebut diterjemahkan:

### 3.4. Uji Hipotesis

#### 3.4.1. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menilai apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara kolektif terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Hasil dari pengujian statistik F ini akan disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 9. Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1941.003	4	485.251	86.173	.000 <sup>b</sup>
	Residual	534.957	95	5.631		
	Total	2475.960	99			
a. Dependent Variable: Y_Rata-rata						
b. Predictors: (Constant), X4_Rata-rata, X1_Rata-rata, X3_Rata-rata, X2_Rata-rata						

Sumber : Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Hasil dari pengujian statistik F ini disajikan dalam Tabel 5.11. Berdasarkan tabel tersebut, nilai Fhitung sebesar 86.173 dengan nilai Ftabel 3.95. Dengan demikian, karena nilai Fhitung (86.173) jauh lebih besar daripada nilai Ftabel (3.95) dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menyiratkan bahwa variabel Sanksi Pajak ( $X_1$ ), Pembebasan bea balik nama ( $X_2$ ), kesadaran wajib , kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), dan sosialisasi perpajakan ( $X_4$ ), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) pada Gojek di Kota Jambi.

### 3.4.2. Uji Parsial (Uji T)

Uji  $t$  dilakukan sebagai pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

**Tabel 10. Hasil Uji Statistik T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.519	1.062		1.430	.156
	Sanksi Pajak ( $X_1$ )	.485	.095	.449	5.111	.000
	Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ )	.035	.093	.038	.374	.710
	Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	.059	.085	.065	.698	.487
	Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )	.340	.075	.414	4.557	.000
a. Dependent Variable: Y_Rata-rata						

Sumber : Hasil analisa menggunakan SPSS 25, 2024

Perhitungan t tabel adalah:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= (\alpha/2 ; n-k-1) \\
 &= (0,05/2 ; 100-1-1) \\
 &= (0,025 ; 98) \\
 &= 1,984 / \text{Bisa dilihat di distribusi nilai t tabel}
 \end{aligned}$$

Interprestasi dan Pengujian hipotesis (H) pada tabel 12 ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari Sanksi Pajak ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) secara parsial.  
Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Sanksi Pajak ( $X_1$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) adalah **signifikan** dengan t-hitung sebesar 5,111 (t-hitung > t tabel (1,984)) dan nilai Sig. = 0.000 yang kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Nilai *coefficient* adalah **positif** yaitu sebesar 0,485 yang menunjukkan bahwa arah **hubungan antara Sanksi Pajak ( $X_1$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor adalah positif atau meningkatkan sebesar 48,5%**. Dengan demikian hipotesis  $H_1$  dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Sanksi Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y)” **diterima**.
2. Terdapat pengaruh dari Pembebasan bea balik nama ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) secara parsial.

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) adalah **signifikan** dengan t-hitung sebesar 0,374 (t-hitung < t tabel (1,984)) dan nilai *Sig.* = 0.710 yang lebih dari  $\alpha = 0,05$ . Nilai *coefficient* adalah **positif** yaitu sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa arah **hubungan antara Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor adalah positif atau meningkatkan sebesar 3,5%**. Dengan demikian hipotesis  $H_2$  dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y)” **ditolak**.

3. Terdapat pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) secara parsial.

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) adalah **tidak signifikan** dengan t-hitung sebesar 0,698 (t-hitung < t tabel (1,984)) dan nilai *Sig.* = 0.487 yang lebih dari  $\alpha = 0,05$ . Nilai *coefficient* adalah **positif** yaitu sebesar 0,059 yang menunjukkan bahwa arah **hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor adalah positif atau meningkatkan sebesar 5,9%**. Dengan demikian hipotesis  $H_3$  dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y)” **ditolak**.

4. Terdapat pengaruh dari Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) secara parsial.

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) adalah **signifikan** dengan t-hitung sebesar 4,557 (t-hitung < t tabel (1,984)) dan nilai *Sig.* = 0.000 yang kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Nilai *coefficient* adalah **positif** yaitu sebesar 0,340 yang menunjukkan bahwa arah **hubungan antara Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor adalah positif atau meningkatkan sebesar 34%**. Dengan demikian hipotesis  $H_4$  dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y)” **diterima**.

### 3.4.3. Koefisien Determinasi

Menurut Widarjono (2018) Uji determinasi berfungsi guna mencari koefisien korelasi yang berguna guna mengevaluasi sejauh mana dampak yang diberikan oleh variabel bebas pada variabel terikat.

**Tabel 13. Koefisien Determinan**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 <sup>a</sup>	.784	.775	2.373
a. Predictors: (Constant), X4_Rata-rata, X1_Rata-rata, X3_Rata-rata, X2_Rata-rata				
b. Dependent Variable: Y_Rata-rata				

Sumber : Data Olahan, 2024

Dalam konteks ini, hasil uji determinasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R Square) adalah 0.784. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 78.4% dari variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh gabungan dari variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Koefisien determinasi ini juga memberikan informasi tentang seberapa baik garis regresi dapat memodelkan atau memprediksi variabel terikat berdasarkan data yang diamati. Nilai Adjusted R Square yang hanya sedikit lebih rendah (0.775) menyesuaikan R Square untuk kompleksitas model, mempertimbangkan jumlah dan relevansi variabel bebas yang digunakan dalam analisis regresi tersebut (Widarjono, 2018).

## 3.5. Pembahasan

### 3.5.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa Sanksi Pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y). Hal ini diperkuat dengan nilai t-hitung yang signifikan (5.111) dan nilai signifikansi (*Sig.*) yang sangat rendah (0.000). Koefisien positif (0.485) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, hipotesis H1 bahwa "Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor" diterima. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya implementasi sanksi pajak yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana et al (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dan sistem SAMSAT drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga didukung oleh Pratama (2021) yang menyatakan bahwa sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

### **3.5.2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ). Nilai t-hitung (0.374) lebih kecil dari nilai t tabel yang relevan (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) (0.710) lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di studi ini. Oleh karena itu, hipotesis H2 bahwa "Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor" harus ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari et al (2023) yang menyatakan bahwa pengaruh bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **3.5.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ). Nilai t-hitung (0.698) lebih kecil dari nilai t tabel (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) (0.487) lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Meskipun koefisien positif menunjukkan arah hubungan yang diharapkan (0.059), namun hal ini tidak cukup kuat secara statistik untuk diterima sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Ratnawati (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3.5.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ). Nilai t-hitung (4.557) melebihi nilai t tabel yang relevan (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) sangat rendah (0.000). Koefisien positif (0.340) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis H4 bahwa "Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor" diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

## **4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan hasil analisis, Sanksi Pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ) di Kota Jambi. Nilai t-hitung sebesar 5.111 menunjukkan bahwa hubungan ini kuat secara statistik (t-hitung > t tabel) dengan nilai signifikansi (Sig.) yang sangat rendah, yaitu 0.000. Koefisien positif sebesar 0.485 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Pembebasan Bea Balik Nama ( $X_2$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ) di Kota Jambi. Nilai t-hitung sebesar 0.374 lebih kecil dari nilai t tabel yang relevan (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.710 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor ( $Y$ ) di Kota Jambi. Nilai t-hitung sebesar 0.698 lebih kecil dari

nilai t tabel yang relevan (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.487 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Meskipun koefisien positif sebesar 0.059 menunjukkan arah hubungan yang diharapkan, namun tidak cukup kuat secara statistik untuk diterima sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) di Kota Jambi. Nilai t-hitung sebesar 4.557 melebihi nilai t tabel yang relevan (1.984), dan nilai signifikansi (Sig.) sangat rendah, yaitu 0.000. Koefisien positif sebesar 0.340 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Apsari, R. T., Haryanti, S. S., & Nawangsasi, E. (2023). Pengaruh Bea Balik Nama, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar. *Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan*, 10(1), 28–41. <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent/article/view/1483/960>
- Haninun, D., & Lourent, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1).
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN ( Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat ). *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Pratama, M. A. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Bersama Denpasar. *JUSTBEST: Journal of Sustainable Business and Management*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.52432/justbest.1.1.2021.45-58>
- Rosida, A., & Ernandi, H. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintah dan Hukum di Kota Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Ulfa, I. H., & Ratnawati, J. (2015). Pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), 1–2. [http://eprints.dinus.ac.id/17701/1/jurnal\\_15293.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/17701/1/jurnal_15293.pdf)
- Vika Awuri Salindeho. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 167–176.
- Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285–6293.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Edisi keli). UPP STIM YKPN Yogyakarta.